

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Soekanto Soerjono 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
- Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Timur, 16-17 April 1999 Buku Panduan Pertemuan Berkala, Surabaya
- Tedjosaputro Liliana, 1995, Etika Profesi Notaris dalam penegakkan hukum Pidana, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- Notodisoerjo Soegondo , 1993, Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, Rajawali Pers, Jakarta
- Tan Thong Kie, 2000, Buku I Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- , Buku II Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1998, Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Andasasmita Komar, 1991, NOTARIS I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat, Ikatan Notaris Indonesia daerah Jawa Barat, Bandung.
- Van Hoeve W., 1986, Kamus Bahasa Belanda Indonesia, Ichtar Baru, Jakarta.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soepadmo Djoko, 1994, Kumpulan contoh-Contoh Akta Notaris, Bina Ilmu, Surabaya.

MAKALAH

Pengurus Dacrah INI JATIM, kumpulan hasil up Greading & Refreshing Course tanggal 28-29 Agustus 1998, di Garden Palace Hotel tahun 1998.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk Wetboek, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, Lembar Negara tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara nomor 3316.

Undang-Undang No. 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Lembar Negara tahun 1986 Nomor 20.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia RI Nomor : M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Kenotarian.

Surat Edaran Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Nomor : JHA 5/13/18 tanggal 17 Februari 1981, tentang Pengawasan Notaris.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2/1984 tanggal 1 Maret 1984, tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/008/SKB/VII/1987- No. M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris

Pedoman Peraturan Kenotarian di Indonesia, 2002 . Mitra Karya, Jakarta.